

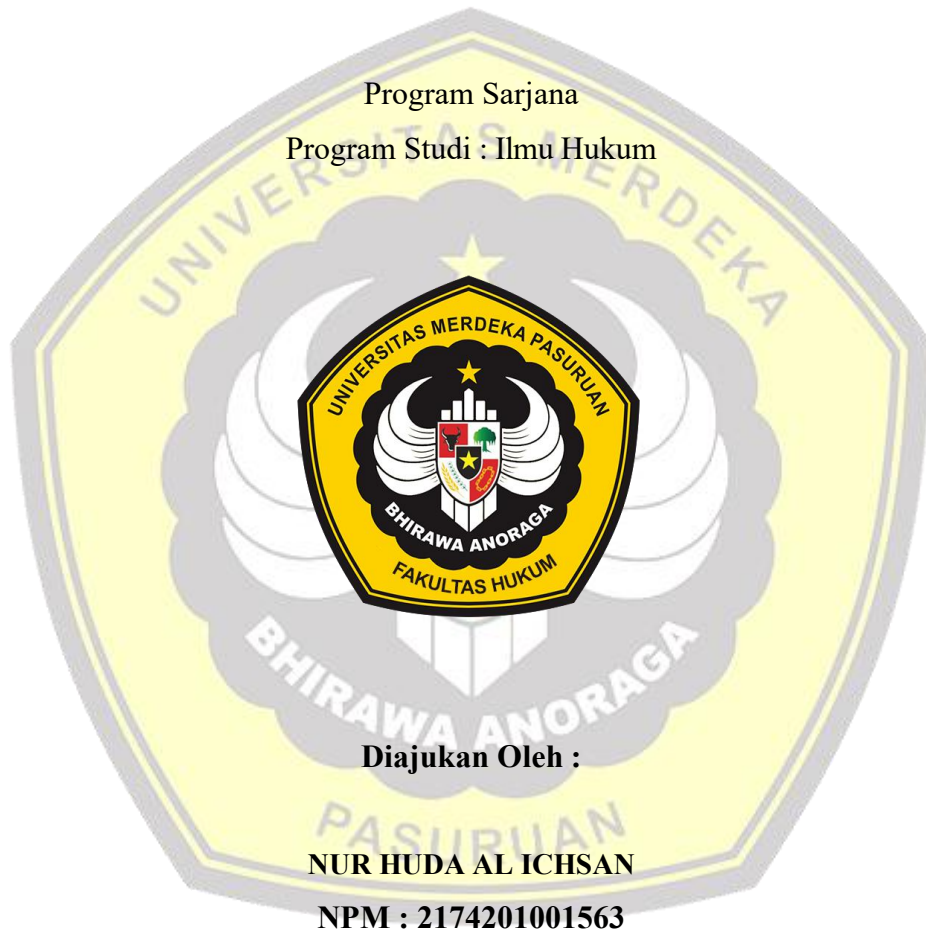
HUKUM TATA NEGARA

**ANALISA YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH
DESA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN DESA KEPADA PUBLIK BERDASARKAN ASAS
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

NUR HUDA AL ICHSAN

NPM : 2174201001563

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

**ANALISA YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH
DESA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN DESA KEPADA PUBLIK BERDASARKAN ASAS
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

NUR HUDA AL ICHSAN

NPM : 2174201001563

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 21 Juli 2025



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

**ANALISA YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DESA
KEPADA PUBLIK BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NUR HUDA AL ICHSAN

NPM : 2174201001563

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 21 Juli 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Wiwin Ariesta., S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 21 Juli 2025

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Di Indonesia, korupsi yang marak terjadi termasuk korupsi keuangan desa, masih sering terjadi, sehingga keterbukaan informasi penting untuk dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa dan pelayanan publik. Untuk menghindari praktik korupsi dan bentuk penyalahgunaan lainnya, transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan sebagai prinsip utama pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban mengenai penggunaan dan/atau pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dalam format yang dapat diterima oleh masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai dana desa sangat penting untuk menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Informasi publik desa disediakan dan dipublikasikan secara berkala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah aspek hukum pengaturan pelaporan keuangan desa oleh pemerintah desa kepada publik secara transparan dan penerapan prinsip akuntabilitas pelaporan keuangan desa untuk mencegah praktik pidana korupsi. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini berfokus pada hukum tertulis, maka kajian pustaka sangat penting untuk melengkapi penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum pengaturan pengungkapan laporan keuangan desa oleh pemerintah desa secara transparan diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang memberikan landasan hukum bagi warga untuk memperoleh informasi termasuk laporan keuangan desa. Penerapan prinsip akuntabilitas laporan keuangan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan oleh berbagai pemangku kepentingan mulai dari masyarakat desa, BPD, camat, APIP hingga Kementerian Desa sendiri dan telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Pengawasan represif pertanggungjawaban dana desa dalam sistem pemerintahan desa melibatkan masyarakat desa dan BPD, dan KPK juga terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi dana desa dan lembaga desa lainnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang.

Kata Kunci : Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 21 Juli 2025

Penulis,



NUR HUDA AL ICHSAN
NPM : 2174201001563

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISA YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DESA KEPADA PUBLIK BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS”** tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan yang menyebabkan skripsi ini masih jauh dari harapan dan kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyowati, M. P;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus dosen penguji yang turut serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan positif dan arahan yang baik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan

telaten serta membagi waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan segenap ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
6. Orang tua dan keluarga penulis tercinta yang tiada henti memberikan do'a dan motivasi bagi penulis serta memberikan tempat ternyaman dan hangat di rumah, semoga penulis bisa membanggakan keluarga.
7. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pasuruan, 21 Juli 2025
Penulis,

NUR HUDA AL ICHSAN
NPM : 2174201001563

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Lembar Persetujuan

Abstrak	i
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa	
1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Desa	13
2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	15
3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	20
4. Organ Pemerintah Desa	20
B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Desa	
1. Pengertian dan Sumber Keuangan Desa	22
2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	24

3. Tata Kelola Keuangan Desa	26
4. Penyalahgunaan Keuangan Desa	28
C. Tinjauan Umum Tentang Informasi Publik	
1. Pengertian Informasi Publik	30
2. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Desa ...	34
3. Prinsip Keterbukaan Informasi Publik di Desa	36
4. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	41
B. Ruang Lingkup Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV : ANALISA YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DESA KEPADA PUBLIK BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS	
A. Aspek Hukum Mengenai Pengaturan Laporan Keuangan Desa Kepada Publik oleh Pemerintah Desa Secara Transparansi	48
B. Penerapan Asas Akuntabilitas Pada Laporan Keuangan Desa Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Halaman

1	Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa	59
---	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

